



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA EVALUASI DIKDASMEN KOMISI X DPR  
RI DENGAN PEJABAT ESELON I KEMDIKBUD RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dengan	: Pejabat Eselon I Kemdikbud RI: <b>1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI;</b> <b>2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud RI;</b> <b>3. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI;</b> <b>4. Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud RI;</b> <b>5. Dirjen Kebudayaan Kemdikbud RI;</b> <b>6. Kepala Balitbang Kemdikbud RI;</b> <b>7. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud RI;</b> <b>8. Inspektorat Jenderal Kemdikbud RI;</b> <b>beserta seluruh jajarannya.</b>
Hari/Tanggal	: Senin, 5 Juni 2017.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M./Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh /Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>1. Sosialisasi, implementasi, permasalahan, perkembangan, dan pengawasan serta evaluasi Standar Nasional Pendidikan (SNP);</b> <b>2. Keterkaitan SNP dengan Sistem Penjaminan Mutu;</b> <b>3. Peta satuan pendidikan per kabupaten/kota dan intervensi pemerintah untuk memenuhi SNP;</b> <b>4. Lain-lain.</b>
Hadir	: 16 orang dari 30 Anggota Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI.

Hadir Pemerintah

: **Pejabat Eselon I dan Eselon II Kemdikbud RI:**

1. Hamid Muhammad/Dirjen Dikdasmen/Plt. Sekjen Kemdikbud RI;
  2. Daryanto/Irjen Kemdikbud RI;
  3. Harris Iskandar/Dirjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud RI;
  4. Sumarna Surapranata/Dirjen GTK Kemdikbud RI;
  5. Totok Suprayitno/Kabalitbang Kemdikbud RI;
  6. Dadang Suhendar/Kepala BPP Bahasa Kemdikbud RI;
  7. Supriano/Direktur PSMP Kemdikbud RI;
  8. Prof. Nizam/Kapuspendik Kemdikbud RI;
- beserta seluruh jajarannya.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kemdikbud RI dibuka pada pukul 10.35 WIB oleh Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M./Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Kemdikbud RI menyampaikan penjelasan mengenai:

1. Sosialisasi, implementasi, permasalahan, perkembangan, dan pengawasan serta evaluasi Standar Nasional Pendidikan (SNP), antara lain:
  - a. Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai kriteria minimal yang dikembangkan dan ditetapkan untuk mengukur/mengevaluasi/menilai mutu pendidikan dan hasilnya sebagai acuan untuk menyusun program peningkatan mutu pendidikan.
  - b. Penetapan SNP setiap 5 (lima) tahun mengalami perubahan atau peningkatan.
  - c. Rata-rata Pemenuhan SNP Tahun 2016:

Sekolah	Capaian Terendah Pemenuhan SNP
SD/MI	Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Sarana Prasarana (Sarpras).
SMP/MTs	Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).
SMA/MA	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Standar Sarana Prasarana (Sarpras).
SMK	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Standar Pengelolaan.
SLB	Standar Sarana Prasarana (Sarpras).

## 2. Keterkaitan SNP dengan Sistem Penjaminan Mutu

Kewajiban	Sekolah	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat
memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.		★	★
Kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.			★
Fasilitasi SP, PTK yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.		★	LPMP ★
Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional		★	Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan ★
Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan	★		

3. Terhadap pemetaan satuan pendidikan per provinsi/kab/kota, Kemdikbud RI telah membuat mekanisme tindak lanjut pembinaannya dengan mengedepankan penyelesaian yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis kewilayahan. (mekanisme terlampir)
- B. Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah (EVDM) Komisi X DPR RI perlu mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait:
1. Ditjen Dikdasmen.
    - (a) Anggaran Sarpras Pendidikan yang dapat dialihkan ke daerah, dengan beberapa catatan:
      - Bisa dilaksanakan minimal 90% oleh daerah;
      - Kualitas bangunan sama dengan APBN;
      - Adanya sistem pelaporan yang dapat diakses publik;
    - (b) Capaian pemenuhan SNP yang rendah adalah guru dan sarana prasarana. Terkait UU No.23/2014, perlu direncanakan pertemuan trilateral dengan Bappenas RI, Kemendagri RI, dan Kemenkeu RI.
    - (c) Terkait capaian pemenuhan SNP sebagaimana tercantum dalam butir A.1.c perlu penjelasan detail mengenai capaian per standar.

2. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)
    - (a) pola rekrutmen guru dan tenaga kependidikan;
    - (b) standar GTK untuk Dikdasmen;
    - (b) peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan pembinaan karirnya;
    - (c) *roadmap* pembinaan dan pengembangan profesi guru.
  3. Balitbang.
    - (a) Hasil penelitian pelaksanaan Dikdasmen selama 5 (lima) tahun;
    - (b) Akses masyarakat terhadap hasil penelitian Balitbang;
    - (c) Pola koordinasi internal Kemdikbud RI terhadap hasil penelitian Balitbang.
  4. Ditjen PAUD dan Dikmas.
    - (a) Kontribusi program paket A/B/C terhadap penuntasan wajib belajar.
    - (b) Kontribusi PAUD terhadap akses, mutu dan relevansi pendidikan.
  5. Inspektorat Jenderal.
    - (a) Program pengawasan terhadap pelaksanaan Dikdasmen;
    - (b) Pola pengawasan terhadap rekomendasi BPK.
  6. Kebijakan pemenuhan SNP terkait dengan Pemerintah Daerah.
  7. Perlu dipertimbangkan indikator pembangunan pendidikan menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM).
- C. Jawaban dan tanggapan pejabat Eselon I Kemdikbud RI diberikan secara tertulis sesuai ruang lingkup dan tujuan Panja EVDM Komisi X DPR RI dan diterima Sekretariat Komisi X DPR RI paling lambat pada tanggal 13 Juni 2017.
- D. Kemdikbud RI akan mengundang Panja EVDM Komisi X DPR RI dalam Seminar/FGD (*Focus Group Discussion*) untuk melakukan pendalaman materi terkait Tugas dan fungsi pada setiap Eselon I Kemdikbud RI yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal Kemdikbud RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.30 WIB

KETUA RAPAT,  
  
DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.